

LAHAN PERTANIAN-PERLINDUNGAN

2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Lahan pertanian pangan di Kabupaten Sambas semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional, sehingga untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sambas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian, Peraturan Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Peraturan Daerah ini memuat :

1. Ketentuan Umum
2. Perencanaan
3. Penetapan
4. Pengembangan
5. Penelitian
6. Pemanfaatan
7. Pembinaan
8. Pengendalian
9. Pengawasan
10. Sistem Informasi
11. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
12. Pembiayaan
13. Peran Serta Masyarakat
14. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah terdiri dari 14 BAB dan 48 Pasal.
- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.